



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**PERUBAHAN REAKSI MASYARAKAT HONG KONG
TERHADAP PENERAPAN ASAS “*ONE COUNTRY,
TWO SYSTEMS*” SETELAH TAHUN 2014**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana Program Studi Ilmu
Hubungan Internasional

Oleh

Zincka Neyla Piliano 2017330117

Bandung 2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**PERUBAHAN REAKSI MASYARAKAT HONG KONG
TERHADAP PENERAPAN ASAS “*ONE COUNTRY,
TWO SYSTEMS*” SETELAH TAHUN 2014**

Skripsi

Zincka Neyla Piliano 2017330117

Pembimbing

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Zincka Neyla Piliano
Nomor Pokok : 2017330117
Judul : Perubahan Reaksi Masyarakat Hong Kong Terhadap Penerapan Asas
"One Country, Two Systems" Setelah Tahun 2014

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 21 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

: 

Sekretaris
Sylvia Yazid, Ph.D

: 

Anggota
I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zincka Neyla Piliano

NPM : 2017330117

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Perubahan Reaksi Masyarakat Hong Kong Terhadap Penerapan Asas
“*One Country, Two Systems*” Setelah Tahun 2014

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 6 Januari 2021



Zincka Neyla Piliano

2017330117

ABSTRAK

Nama : Zincka Neyla Piliano
NPM : 2017330117
Judul : Perubahan Reaksi Masyarakat Hong Kong Terhadap Penerapan
Asas “*One country, two systems*” Setelah Tahun 2014

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dinamika perubahan reaksi masyarakat Hong Kong terhadap penerapan asas “*one country, two systems*” setelah tahun 2014 yang berlandaskan pada pertanyaan penelitian, “bagaimana perubahan reaksi masyarakat Hong Kong terhadap penerapan asas “*one country, two systems*” setelah aksi protes “*Umbrella Revolution*” pada tahun 2014?”. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan konsep demokrasi *illiberal* dari Fareed Zakaria untuk menjelaskan penyebab terjadinya aksi protes, dan konsep gerakan sosial dari Charles Tilly untuk menjelaskan reaksi masyarakat terhadap penerapan sistem wilayahnya. Analisis yang dilakukan berfokus pada perbedaan yang terdapat pada reaksi masyarakat sebelum tahun 2014, khususnya pada tahun 2010, 2012, dan 2013. Ketiga tahun tersebut digunakan sebagai sampel penelitian karena aksi protes yang dilakukan memiliki keterkaitan dengan penerapan asas “*one country, two systems*” di Hong Kong. Kemudian untuk perbandingannya, penulis menggunakan tahun 2014, 2016, dan 2019 untuk meneliti perubahan reaksi yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengambil sumber data dari dokumen-dokumen. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, gerakan “*Umbrella Revolution*” menjadi titik balik perubahan reaksi masyarakat Hong Kong. Hal ini dikarenakan, terdapat perubahan bentuk reaksi masyarakat dari yang sebelumnya bervariasi, menjadi sangat berfokus pada aksi protes dalam bentuk demonstrasi. Perubahan kedua terdapat pada karakteristik aksi protesnya. Setelah tahun 2014, aksi protes cenderung bersifat radikal dan anarkis, sudah mulai terbentuk gerakan sosial yang lebih terstruktur dengan perencanaan yang matang. Sementara sebelum tahun 2014, aksi protes bersifat lebih damai dan tertib.

Kata Kunci: Reaksi, Hong Kong, “*One country, two systems*”, Demokrasi *Illiberal*, Gerakan Sosial

ABSTRACT

Name : Zincka Neyla Piliano
Student Number : 2017330117
Title : *Changes in the reaction of the Hong Kong people towards the implementation of the principle of "One country, two systems" after 2014*

This research was conducted to explain the dynamics of changes in the reaction of the Hong Kong people towards the application of the principle of "*one country, two systems*" after 2014 which is based on the research question, "how has the change in the reaction of the Hong Kong people to the application of the principle of "*one country, two systems*" after the protest action "Umbrella Revolution" in 2014?". In answering these research questions, the author uses the concept of illiberal democracy from Fareed Zakaria to explain the causes of the protests, and the concept of social movement from Charles Tilly to explain the reaction of the people to the application of this regional system. The analysis focused on the differences in people's reactions before 2014, particularly in 2010, 2012 and 2013. These three years were used as research samples because the protests carried out were related to the application of the principle of "*one country, two systems*" in Hong Kong. Then for comparison, the authors used the year of 2014, 2016, and 2019 to examine the changes in reactions that occurred. The method used in this research is a qualitative method by taking data sources from documents. The results found in this study were the "Umbrella Revolution" movement as a turning point in the changed reaction of the Hong Kong people. This is because, there has been a change in the form of the public reaction from previously varied, to being very focused on protests in the form of demonstrations. The second change is in the characteristics of the protest. After 2014, the protests tended to be radical and anarchist in nature, and social movements that were more structured and well-planned had begun. Meanwhile, before 2014, protests were more peaceful and orderly.

Key Words: Reaction, Hong Kong, "*One country, two systems*", Illiberal Democracy, Social Movement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perubahan Reaksi Masyarakat Hong Kong Terhadap Penerapan Asas “*One country, two systems*” Setelah Tahun 2014”. Penulisan penelitian ini ditunjukkan sebagai pemenuhan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar di Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Pembahasan mengenai dinamika perubahan reaksi masyarakat Hong Kong terhadap penerapan asas “*one country, two systems*” di wilayahnya setelah tahun 2014, merupakan fokus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Rangkaian aksi protes yang menandakan keberlanjutan reaksi masyarakat dari tahun 2010 hingga tahun 2019 akan dibahas secara menyeluruh. Penelitian ini menggarisbawahi perbedaan-perbedaan yang terlihat pada setiap rangkaian aksi protes tersebut. Penulis memohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dalam penelitian ini, karena penulis sadar bahwa masih banyak hal yang dapat diperbaiki dari penulisan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk segala kritik dan sarannya agar dapat mengembangkan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, baik untuk menambah wawasan atau menjadi bahan referensi atas penelitian serupa.

Jakarta, 6 Januari 2021

Zincka Neyla Piliano

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Allah SWT,

Atas izin dan berkat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Kepada Keluarga Tersayang,

Kepada Mama, Ayah, Kakak, dan Kak Vana, Ibu, Papa Epi, serta Om Heri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan serta doanya selama studi saya di Bandung. Terima kasih karena selalu memberikan saya motivasi agar terus berusaha dan mendorong saya untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun kendala yang saya hadapi. Saya berharap dengan ini, saya dapat menjadi seseorang yang dibanggakan keluarga saya.

Kepada Mba Sylvia,

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mba Syl selaku pembimbing yang telah banyak membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Saya yakin tanpa arahan dan masukannya, saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dalam waktu yang sangat singkat.

Kepada Dosen HI,

Walaupun saya tidak dapat menyebutkannya satu-persatu, tetapi saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran dosen HI yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Terima kasih karena telah membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya yakin ilmu yang telah saya dapatkan selama 3.5 tahun belajar di HI Unpar akan berguna bagi kehidupan saya kedepannya.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mba Vrames, karena telah mengajarkan saya banyak mata kuliah KBI 1 yang menyenangkan, dan juga untuk Mas Gi yang telah banyak membantu saya sebagai dosen pendamping pada *Foreign Exposure* 2019.

For the ones that I love and cherish the most, all these wonderful people that made me who I am today.

Kepada Sahabat-sahabat di HI,

Untuk Jeruth, Kezia, Alya, Stella, Salma, Marvel, dan Abong, saya ucapkan terima kasih karena telah membuat hari-hari saya di Unpar menjadi sangat menyenangkan. Terima kasih karena telah membantu saya dalam banyak hal, saya bersyukur telah dipertemukan dengan kalian di Unpar. Saya berharap kedepannya, kita dapat menjadi orang-orang yang dapat dibanggakan dan tetap menjalin hubungan yang baik. *see you on top!*

Kepada Sahabat-sahabat Unpar,

Terima kasih kepada Nabila, dan Thifa yang telah menjadi teman-teman yang sangat menyenangkan di masa perkuliahan saya. Terima kasih karena telah banyak membuat memori yang sangat berharga bagi saya.

Saya ucapkan terima kasih juga kepada Arrazy yang telah mengisi hari-hari terakhir saya sebagai mahasiswi di Unpar. Terima kasih karena selalu sabar dan percaya kepada saya, bahkan lebih dari saya percaya kepada diri sendiri.

Kepada Sahabat-sahabat SMA,

Saya ucapkan terima kasih kepada Sasha, Vira, Laras, Salma, dan Ichsan, karena telah menjadi tempat untuk berpaling, tempat untuk saya berkeluh-kesah. Terima kasih karena kalian selalu menjadi *support system* saya.

Kepada Sahabat-sahabat lainnya,

Saya ucapkan terima kasih kepada Nadine, Nisa, Mawjihan, dan Aul, karena telah menjadi sahabat-sahabat baik sejak dulu. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Gerina dan Jihan, karena selalu membuat hari-hari saya menyenangkan. Kalian adalah orang-orang yang selalu menemani dalam setiap langkah di kehidupan saya.

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	3
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.2.3 Tujuan Penelitian	8
1.2.4 Kegunaan Penelitian	9
1.3 Kajian Pustaka	9
1.4 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	15
1.5.1 Metode Penelitian	15
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data	16
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II HONG KONG DI BAWAH ASAS “ONE COUNTRY TWO	

SYSTEMS”	18
2.1 Perjanjian “Sino-British Declaration” sebagai awal terbentuknya asas “One country, two systems”	19
2.2 Pengaruh Tiongkok dalam penerapan asas “One country, two systems” di Hong Kong	22
2.3 Kondisi domestik Hong Kong di bawah Asas “One Country, Two Systems”	25
2.3.1 Dampak Penerapan Asas “One Country, Two Systems” terhadap Sistem Pemerintahan Hong Kong	25
2.3.2 Dampak penerapan asas “one country, two systems” terhadap hak dan kebebasan masyarakat Hong Kong	28
 BAB III REAKSI MASYARAKAT HONG KONG TERHADAP PENERAPAN ASAS “ONE COUNTRY TWO SYSTEMS” SEBELUM TAHUN 2014	 34
3.1 Reaksi Masyarakat Hong Kong pada tahun 2010	35
3.1.1 Aksi Protes Tahun Baru 2010	35
3.1.2 Protes Tahunan 1 Juli 2010 Hong Kong.....	37
3.2 Reaksi Masyarakat Hong Kong pada tahun 2012	39
3.2.1 Gerakan Anti Pendidikan Nasional	39
3.2.2 Protes Tahunan 1 Juli 2012 Hong Kong.....	41
3.3 Reaksi Masyarakat Hong Kong pada Tahun 2013	43
3.3.1 Aksi Pemogokan Dermaga Hong Kong	43
3.3.2 Protes Tahunan 1 Juli 2013 Hong Kong.....	45

BAB IV HONG KONG DI BAWAH ASAS “ONE COUNTRY TWO SYSTEMS”	48
4.1 Reaksi Masyarakat pada Tahun 2014.....	49
4.1.1 Demokrasi Liberal Sebagai Penyebab Terjadinya Aksi Protes “Umbrella Revolution”	49
4.1.2 Gerakan Sosial “Umbrella Revolution”	52
4.2 Reaksi Masyarakat pada Tahun 2016.....	56
4.2.1 Kemunculan Kelompok Lokalis Hong Kong Sebagai Salah Satu Faktor Pendorong Terbentuknya “Fishball Revolution”	56
4.2.2 Kerusuhan “Fishball Revolution”	59
4.3 Reaksi Masyarakat Pada Tahun 2019.....	61
4.3.1 Rancangan Undang-Undang Hukum Ekstradisi sebagai penyebab terjadinya aksi protes tahun 2019	61
4.3.2 Protes Anti Hukum Ekstradisi	63
BAB V KESIMPULAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Survey Persepsi Kebebasan Masyarakat Hong Kong	53
Gambar 4.2 Pengembangan wacana publik tentang “kelompok lokalis” dari 2007 hingga Mei 2016.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asas “*one country, two systems*” merupakan bentuk realisasi jaminan keberlangsungan sistem ekonomi kapitalis dan pemerintahan demokrasi yang berlaku selama 50 tahun bagi Hong Kong sejak tahun 1997.¹ Asas tersebut dituliskan pada perjanjian “*Sino-British Declaration*” yang di dalamnya juga terdapat hasil negosiasi antara Inggris dan Tiongkok untuk mengatur segala bentuk pemindahan kekuasaan dengan mengelaborasi kebijakan dasar seperti konstitusi, sistem hukum, finansial, edukasi, dan Hak Asasi Manusia.² Melalui penerapan asas tersebut, Hong Kong diberikan tingkat otonomi yang tinggi untuk mengatur segala aspek di dalam wilayahnya, terkecuali pada aspek pertahanan dan hubungan luar negeri.³

Asas tersebut dibentuk untuk menjaga perekonomian Hong Kong yang merupakan salah satu yang paling maju di Asia. Proses industrialisasi pesat menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan tingkat ekonomi ekspor-impor tertinggi di dunia yang sebelumnya hanya merupakan wilayah yang relatif tidak berpenghuni sebelum abad ke 20. Perkembangan pesat Hong Kong didorong oleh

¹ “The Joint Declaration”, Constitutional and Mainland Affairs bureau, <https://www.cmab.gov.hk/en/issues/jd3.htm> (diakses 16 Januari 2020).

² Kwok-Shing Chan. “A Localized Culture of Welfare: Entitlements, Stratification, And Identity in A Chinese Lineage Village”, (UK: Lexington Books, 2012). Hlm 2

³ Constitutional and Mainland Affairs bureau, loc. Cit.

posisi geografisnya yang strategis membuat pelabuhan alami yang menjadi gerbang perdagangan komersial regional dan internasional.

Tingkat otonomi tinggi diberikan oleh pemerintah Tiongkok dengan menyadari pentingnya preservasi sistem perekonomian kapitalis yang dimiliki oleh Hong Kong demi keberlanjutan kesuksesannya ekonominya.⁴ Walaupun pemerintah Tiongkok telah memberikan sistem terpisah pada Hong Kong untuk menjaga sistem yang sudah ada, masyarakat Hong Kong tetap tidak mendukung pemindahan kekuasaan wilayahnya kepada Tiongkok.⁵

Dalam kurun waktu kurang lebih tujuh tahun sebelum resmi disahkannya “*Sino-British Declaration*”, setengah juta masyarakat Hong Kong melakukan migrasi besar-besaran. Migrasi ini didorong oleh rasa ketakutan masyarakat akan berkurangnya hak-hak sipil, supremasi hukum, dan kebebasan yang secara langsung berkaitan dengan kualitas hidup mereka bila wilayah mereka secara resmi telah diatur di bawah kekuasaan sosialis otoriter pemerintah Tiongkok. Masyarakat juga takut akan direnggutnya stabilitas dan kemakmuran atas wilayahnya, serta direnggutnya sistem pemerintahan demokrasi Hong Kong yang ditandai dengan istilah *gong yan ji gong* (masyarakat Hong Kong mengatur Hong Kong).⁶

Terdapat krisis kepercayaan yang populer di antara masyarakat Hong Kong, hal ini ditandai dengan banyaknya bisnis yang ditutup sesaat sebelum resminya pemindahan tersebut. Krisis ini terjadi karena persepsi negatif masyarakat

⁴ Lau Siu-Kai. “Society and Politics in Hong Kong”. (The Chinese University Press, 1993). Hlm.12.

⁵ Ray Yep, Ma Ngok, dan Ian Hollida, “A High Degree of Autonomy? Hong Kong Special Administrative Region, 1997-2002”, *The Political Quarterly* 73,no.4(2002),<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-923X.00500> (diakses pada 16 Januari 2020).

terhadap kapabilitas pemerintah Tiongkok.⁶

Sejak tahun 1940 an, banyak masyarakat Tiongkok yang melakukan migrasi ke Hong Kong karena mengalami kondisi perekonomian buruk yang dipercaya terjadi karena sistem sosialis negaranya. Pandangan pesimistis tersebut kemudian bertambah parah ketika masyarakat Hong Kong melihat respon agresif pemerintah Tiongkok terhadap demonstrasi yang terjadi di Beijing pada tahun 1989. Banyak yang memandang sikap opresi pemerintah Tiongkok dalam menanggapi demonstrasi di Beijing tersebut sebagai masa depan Hong Kong.⁷

Pada tahun 2014, terjadi demonstrasi skala besar pertama yang menjadi titik balik perubahan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong. Aksi tersebut dipicu oleh pemilihan kepala eksekutif yang akan datang. Masyarakat turun ke jalan untuk menuntut hak pilih universal secara keseluruhan. Selama berdirinya Hong Kong sebagai wilayah otonomi tingkat tinggi, kepala eksekutif tidak pernah dipilih berdasarkan pilihan rakyat melalui pemilihan terbuka. Pemilihan eksekutif dilakukan oleh “komite pemilihan” yang berisikan 1.200 elit politik pro-Beijing.⁸ Padahal sejak tahun 2004, Tiongkok telah menjanjikan untuk mengadakan pemilihan umum Kepala Eksekutif, namun kemudian rencana tersebut diundur hingga tahun 2012. Setelahnya, pada tahun 2007 kelompok pro-demokrasi

⁶ Kwok-Shing Chan, op. cit. Hlm 4

⁷ Hon S. Chan, “The Civil Service under One country, two systems: The Cases of Hong Kong and the People's Republic of China”, *Public Administration Review* 63,no.4(2003),<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1540-6210.00304> (diakses pada 16 Januari 2020).

⁸ Jonathan Kaiman, “Hong Kong’s umbrella revolution - the Guardian briefing,” *The Guardian*, 30 September 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/30/-sp-hong-kong-umbrella-revolution-pro-democracy-protests> (diakses pada 17 Januari 2020).

kembali menuntut reformasi elektoral yang menerapkan hak pilih universal, namun sekali lagi Tiongkok mengundur rencana tersebut hingga tahun 2017. Penundaan penerapan demokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat menyebabkan akumulasi rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya memicu kemunculan aksi- aksi demonstrasi berskala besar yang cenderung anarkis.⁹

Demonstrasi di Hong Kong adalah sesuatu yang sering terjadi, hampir setiap tahun masyarakat beramai-ramai turun ke jalan melakukan unjuk rasa sebagai bentuk reaksi mereka terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah.¹⁰ Namun, terdapat perubahan reaksi masyarakat setelah terjadinya “*Umbrella Revolution*” di tahun 2014. Oleh karena itu, yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan tersebut terjadi.

1.2 Identifikasi Masalah

Asas “*one country, two systems*” dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sistem ekonomi kapitalis dan gaya hidup masyarakat Hong Kong yang sudah terbentuk sejak dahulu. Walaupun masyarakat Hong Kong dan Tiongkok berasal dari mayoritas etnis yang sama, yaitu etnis Han dan mayoritas masyarakatnya sama-sama menggunakan Bahasa Kanton, terdapat perbedaan yang cukup

⁹ Adam Rose, “Is Hong Kong Getting Any Closer to Real Democracy?”, TIME, 11 Maret 2010, <https://content.time.com/time/world/article/0,8599,1971283,00.html> (diakses pada 17 Januari 2020).

¹⁰ Adam Rose, op. cit.

signifikan berdasarkan kebudayaan yang mereka miliki. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh pengaruh gaya hidup liberal dari jajahan Inggris yang menyebabkan kebudayaan masyarakat Hong Kong lebih terpengaruh budaya luar dibandingkan masyarakat daratan Tiongkok.¹¹

Tidak hanya pada aspek budaya, perbedaan yang cukup signifikan juga terdapat pada aspek politik antara Hong Kong dan Tiongkok. Sejak resminya pemindahan wilayah dari Koloni Inggris, Hong Kong saat ini merupakan wilayah khusus yang diberikan kekuasaan terbatas berdasarkan tingkat otonomi yang tinggi. Terdapat kebebasan lebih bagi Hong Kong untuk menjalankan wilayahnya dengan menerapkan sistem semi-demokrasi. Sistem tersebut diimplementasikan dengan menggunakan basis hukum (*Basic Law*) yang dibuat dan disepakati dalam “*Sino-British Declaration*”.¹²

Salah satu poin dalam perjanjian tersebut mengatur tentang pemilihan kepala eksekutif yang merupakan pemimpin setara dengan presiden atau perdana menteri di Hong Kong. Perlu digaris-bawahi bahwa kepala eksekutif di Hong Kong dapat ditunjuk melalui pemilihan umum atau konsultasi yang dilakukan secara lokal dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Tiongkok. Namun sejak diberlakukannya perjanjian “*Sino-British Declaration*”, kepala eksekutif tidak pernah ditunjuk berdasarkan pilihan rakyat Hong Kong. Pemilihan kepala eksekutif selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat, hal ini yang menjadi salah satu

¹¹ Lau Siu-Kai, loc. cit.

¹² Gregory S. Gordon, “When 'ONE COUNTRY TWO SYSTEMS' Meets 'One Person One Vote': The Law of Treaties and the Handover Narrative Through the Crucible of Hong Kong's Election Crisis”, *Melbourne Journal of International Law* 16,no.2 (2016), (diakses pada 17 Januari 2020).

permasalahan dalam pemberlakuan asas “*one country, two systems*”. Dalam implementasinya, sistem semi-demokrasi wilayah Hong Kong menjadi rancu. Masyarakat yang dijanjikan jaminan sistem pemerintahan demokrasi melalui tingkat otonomi tinggi, pastinya akan menuntut untuk mendapatkan hak-hak mereka yang memang sudah jelas tertulis dalam perjanjian “*Sino-British Declaration*”.¹³

Permasalahan kedua yang berkaitan dengan ketidak-jelasan sistem demokrasi di Hong Kong adalah kegunaan dari badan legislatif pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, badan legislatif secara umum memiliki tugas serta wewenang untuk memberikan masukan serta persetujuan kepada presiden atau kepala negara, merumuskan rancangan undang-undang, dan merupakan perwakilan rakyat yang mengedepankan kepentingan dan kemauan rakyat termasuk dengan mengusulkan pemberhentian presiden atau kepala negara.¹⁴ Dalam kasus Hong Kong, badan legislatif dapat mengusulkan legislasi seperti sebagaimana harusnya dalam negara-negara demokratis lain. Badan legislatif Hong Kong hanya dapat memilih, memeriksa, memberlakukan, dan mengubah undang-undang yang diusulkan. Melewati salah satu tahap dari proses tersebut berarti mengurangi kekuatan demokrasi yang dimiliki rakyat, dan hal itulah yang terjadi pada kasus rencana hukum ekstradisi tahun 2019. Sekretaris Keamanan John Lee Ka-Chiu melewati langkah penting yang seharusnya dilakukan

¹³ Ibid.

¹⁴ “Powers and Functions of Legislative Council,” Legislative Council In Brief, No.10(2015), <https://www.legco.gov.hk/education/files/english/Factsheet/Factsheet10.pdf> (diakses pada 20 Januari 2020).

dalam pembentukan undang-undang baru, yaitu melewati persetujuan Komite Rancangan Undang-undang (UU) dan membawa Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut langsung ke dewan penuh.¹⁵

Sejak diresmikannya wilayah Hong Kong sebagai bagian dari Tiongkok, setiap tahunnya diadakan demonstrasi oleh masyarakat Hong Kong yang secara umum menuntut hak-hak dasar dan kebebasan yang sejalan dengan asas demokrasi. Namun, demonstrasi terbesar yang memicu reaksi keras masyarakat hingga membentuk gerakan sosial untuk reformasi, terjadi pada tahun 2014. Masyarakat menuntut janji Beijing untuk memberikan Hong Kong hak pilih universal dalam pemilihan kepala eksekutif tahun 2017, tetapi sampai saat ini pemilihan masih dilakukan oleh komite pencalonan.¹⁶ Aksi protes tersebut menunjukkan terjadinya perubahan reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan asas “*one country, two systems*” di Hong Kong.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam membuat penelitian ini, penulis membatasi lingkup pembahasan dengan berfokus pada perubahan reaksi masyarakat Hong Kong terhadap penerapan asas “*one country, two systems*” oleh Tiongkok dan kaitannya dengan permasalahan demokrasi di Hong Kong sebelum dan sesudah tahun 2014. Jangka

¹⁵ Sum Lok-kei dan Alvin Lum, “Hong Kong government to take drastic step in fast-tracking controversial fugitive bill,” South China Morning Post, 20 Mei 2019, <https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3010946/hong-kongs-controversial-fugitive-bill-skip-legislative> (diakses pada 20 Januari 2020).

¹⁶ “Hong Kong’s umbrella revolution - the Guardian briefing”, loc. cit.

waktu penelitian dibatasi dari tahun 2010-2019, dengan konsiderasi perbandingan reaksi masyarakat Hong Kong sebelum terjadinya demonstrasi skala besar “*Umbrella Revolution*” pada tahun 2014 sebagai awal mula tercetusnya tuntutan masyarakat Hong Kong atas demokrasi penuh yang terus berlanjut hingga lima tahun setelahnya, sampai pada demonstrasi hukum ekstradisi tahun 2019. Demonstrasi-demonstrasi tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap sistem dan kestabilan wilayah Hong Kong.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada bagian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah. Penulis melakukan penelitian berdasarkan pertanyaan: **“Bagaimana perubahan reaksi masyarakat Hong Kong terhadap penerapan asas “*one country, two systems*” setelah aksi protes “*Umbrella Revolution*” pada tahun 2014?”**

1.2.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak penerapan asas “*one country, two systems*” terhadap sistem demokrasi dan pengaruhnya terhadap masyarakat Hong Kong. Penulis ingin mengetahui bagaimana perubahan reaksi masyarakat Hong Kong terhadap penerapan asas “*one country, two systems*” setelah tahun 2014 yang ditandai dengan demonstrasi berskala besar yang menuntut demokrasi penuh, hingga tahun 2019.

1.2.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami bagaimana dinamika perubahan reaksi masyarakat Hong Kong atas asas “*one country, two systems*” serta faktor terjadinya perubahan tersebut, dan juga memberikan kontribusi di bidang akademis untuk digunakan sebagai sumber penelitian lain dengan topik yang relevan.

1.3 Kajian Pustaka

Mayoritasnya dalam berbagai jurnal atau buku mengenai asas “*one country, two systems*” Hong Kong, yang dibahas adalah bagaimana Tiongkok menggunakan asas tersebut sebagai instrumen untuk mendapatkan kepentingannya. Pembahasan biasanya berfokus pada perspektif aktor negara seperti pemerintah dalam menerapkan asas tersebut di wilayah Hong Kong. Seperti yang dibahas dalam artikel jurnal “*A High Degree of Autonomy? Hong Kong Special Administrative Region, 1997-2002*” oleh Ian Holliday, Ma Ngok, dan Ray Yep. Di dalam jurnal tersebut membahas mengenai otonomi politik Hong Kong yang sangat bergantung dan terpengaruh oleh perubahan kebutuhan dan preferensi politik pemerintah pusat. Ikatan antara elit pusat dan daerah, serta ketentuan terbatas untuk kontrol demokratis, menimbulkan pertanyaan terkait otonomi tinggi yang dimiliki Hong Kong. Terdapat jarak antara sistem demokrasi yang diberikan kepada Hong Kong dalam perjanjian “*Sino-British Declaration*” dengan penerapannya secara

realita.¹⁷

Kemudian, mayoritas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, membahas mengenai bagaimana penerapan asas tersebut berdampak pada sistem demokrasi wilayah Hong Kong serta hak dan kebebasan masyarakat di bawah asas “*one country, two systems*”. Tetapi pembahasan berhenti sampai bagaimana asas tersebut berdampak pada sistem dan aturan-aturan wilayah Hong Kong, tanpa membahas bagaimana reaksi masyarakat terhadap keterbatasan hak dan kebebasan yang mereka dapatkan karena penerapan asas tersebut. Sebagaimana telah dibahas oleh Gregory S. Gordon dalam artikel jurnal “*When ‘One country, two system’ Meets ‘One Person, One Vote’: The Law of Treaties and The Handover Narrative Through the Crucible of Hong Kon’s Election Crisis*”. Ia membahas tentang krisis pemilu tahun 2014 dan bagaimana asas “*one country, two systems*” yang diterapkan di Hong Kong memiliki multi-interpretasi mengenai hak-hak demokrasi yang dimiliki masyarakat. Salah satu hak yang menjadi fokus dalam jurnal tersebut adalah hak pilih universal. Gordon menyatakan sistem politik hibrida yang diterapkan oleh Tiongkok semakin lama semakin mengurangi esensi awal dari sistem tersebut, yaitu untuk menjaga sistem demokrasi di Hong Kong. Tiongkok menjadikan sistem tersebut sebagai instrumen untuk memperkuat pengaruh otoriternya sekaligus mengurangi demokrasi Hong Kong dalam aspek kebebasan memilih.¹⁸

¹⁷ Ray Yep, Ma Ngok, dan Ian Holliday, loc. cit.

¹⁸ Alvin Y. So, “One country, two systems and Hong Kong-China National Integration: A Crisis Transformation Perspective,” *Journal of Contemporary Asia* 41, no.1 (2015):99-116, https://www.researchgate.net/publication/254318050_One_Country_Two_Systems_and_Hong_Kong-China_National_Integration_A_Crisis-Transformation_Perspective, (diakses pada 20

Dikarenakan belum banyaknya buku atau artikel jurnal yang membahas mengenai reaksi masyarakat Hong Kong terhadap penerapan asas “*one country, two systems*”, sehingga penelitian ini ditujukan untuk membahas hal tersebut terutama perubahan reaksi masyarakat yang terjadi sejak tahun 2014. Lebih lanjut, dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji isu menggunakan perspektif yang diberikan oleh dua artikel jurnal tersebut. Perspektif yang diberikan oleh kedua jurnal tersebut memberikan penjelasan komprehensif terhadap masalah yang dimiliki Hong Kong, dan dapat dikaitkan dengan aksi protes yang terjadi hampir setiap tahunnya di Hong Kong. Protes-protes tersebut terjadi akibat aksi pro-demokrasi yang ditunjukkan oleh masyarakat Hong Kong atas ketidakpuasan mereka dengan sistem wilayah mereka saat ini.

1.4 Kerangka Pemikiran

Negara melalui peran pemerintah memiliki tugas untuk membantu individu dalam meningkatkan dan menjaga kebebasan yang dimiliki sebagai fokus utama dalam politik.¹⁹ Melalui kebebasan individu, liberalisme memperkenalkan konsep demokrasi yang secara garis besar menurut Abraham Lincoln dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.²⁰ Sementara menurut Robert Dahl, dalam proses demokratisasi suatu negara

Januari 2020).

¹⁹ Robert H. Jackson, and Georg Sørensen, “Introduction to International Relations Theories and Approaches,” (UK: Oxford University Press, 2013).

²⁰ “Democracy in Brief”, Korea Embassy, https://kr.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/75/2017/04/Democracy-in-Brief_kor-1.pdf (diakses pada 10 Februari 2020).

diperlukan “*Polyarchy*” yang memiliki arti pemerintahan oleh banyak orang dan bertumpu pada proses pemilihan terbuka dan keputusan kolektif.²¹

Demokrasi liberal menurut Robert Dahl adalah ideologi politik yang berangkat dari asumsi-asumsi perspektif liberalisme yang ditandai dengan kebebasan rakyat untuk menjadi atau memilih representatif dalam pemerintahan, kekuasaan yang tidak terfokus pada satu melainkan terbagi menjadi cabang- cabang pemerintahan, memiliki konstitusi sebagai aturan dasar, perlindungan hak- hak asasi manusia, serta ekonomi terbuka. Walaupun secara umum demokrasi sering diasosiasikan dengan liberalisme, namun terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa keduanya tidak selalu beriringan, seperti yang terjadi pada Hong Kong dapat dikategorikan sebagai demokrasi *illiberal*.²²

Konsep demokrasi *illiberal* atau bisa juga disebut dengan demokrasi hampa, rezim hibrida, dan demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana masyarakatnya diperkenalkan terhadap pemilihan umum, namun kelompok yang memerintah tidak memberikan kebebasan secara utuh sehingga terdapat keterbatasan dalam penggunaan hak-hak demokrasi masyarakat. Sistem seperti ini menurut Fareed Zakaria biasanya terjadi pada negara yang sudah menjalankan pemilihan umum tetapi rezim yang terpilih mengabaikan liberalisme konstitusional. Liberalisme konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai liberalisme klasik dengan mengutamakan otonomi

²¹ Richard W. Krouse, “Polyarchy & Participation: The Changing Democratic Theory of Robert Dahl,” *Palgrave Macmillan Journals* 14, No. 3, (1982): 441- 463, <https://www.jstor.org/stable/3234535> (diakses pada 11 Februari 2020).

²² *Ibid.*

dan melindungi martabat individu dari pemaksaan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, negara tanpa liberalisme konstitusional akan menimbulkan rezim terpusat dan yang terpenting, akan menyebabkan erosi kebebasan.²³

Berkaitan dengan demokrasi *illiberal* atau bisa juga disebut dengan rezim hibrida, asas “*one country, two systems*” merupakan bentuk nyata dari ideologi politik tersebut. Terdapat dua sistem yang diterapkan dalam satu negara dengan tujuan utama untuk menjaga keberlangsungan sistem di suatu wilayah yang telah dibangun sebelumnya. Asas tersebut biasanya dibentuk sebagai kompensasi terhadap akuisisi yang dilakukan negara terhadap suatu wilayah.²⁴

Penerapan asas yang tidak lazim tersebut sudah pasti memiliki implikasinya tersendiri dan memicu timbulnya reaksi dari masyarakat. Walaupun bentuk reaksinya bervariasi, namun secara umum langkah pertama yang akan dilakukan masyarakat adalah membentuk sebuah gerakan sosial agar tuntutan mereka dapat lebih dipertimbangkan. Seperti apa yang dinyatakan oleh Charles Tilly, gerakan sosial adalah sebuah aksi yang terorganisir, berkelanjutan, dilakukan secara sadar oleh orang-orang yang memiliki kesamaan identitas antara satu-sama lain. Hal yang perlu digaris bawahi dalam konsep gerakan sosial ini ada pada dinamikanya yang secara umum terpengaruh dari karakteristik keresahan sosial. Perspektif ini didefinisikan dalam rangkaian interaksi berkesinambungan, di mana orang-orang mengajukan tuntutan perubahan dalam distribusi atau pelaksanaan

²³ Marc F. Plattner, “Illiberal Democracy and the Struggle on the Right”, *Journal of Democracy* 30, no.1,(2019),<https://www.journalofdemocracy.org/articles/illiberal-democracy-and-the-struggle-on-the-right/> (diakses pada 11 Februari 2020).

²⁴ Alvin Y. So, loc. cit.

kekuasaan yang lebih baik karena menyebabkan timbulnya permasalahan sosial dan keresahan publik. Agar mencapai tuntutan tersebut, biasanya didukung dengan aksi demonstrasi.²⁵

Transnasionalisme dalam studi Hubungan Internasional menjelaskan bahwa gerakan sosial bisa dilakukan dalam lingkup domestik oleh aktor non-negara untuk mempengaruhi sistem politik internasional dan nasional. Penjelasan tersebut menekankan bahwa aktor non-negara mampu menarik perhatian internasional kepada fenomena sosial yang sebelumnya hanya pada level nasional. Keterkaitan aspek domestik dengan internasional semakin meningkat seiring dengan berkembangnya zaman. Hal ini dikarenakan semakin memudarnya batas antar negara yang diakibatkan oleh globalisasi.²⁶ Globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antar orang, organisasi, pemerintah dari berbagai negara yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi.²⁷ Melalui globalisasi, masyarakat Hong Kong dapat melihat dan menerapkan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat di negara lain dalam membentuk dan melakukan gerakan sosial. Pada dasarnya gerakan sosial telah lama dilakukan di berbagai tempat di dunia terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Keberhasilan para perempuan di sana memiliki hak pilih dan hak sipil, serta kesetaraan hak orang-orang kulit berwarna (*people of*

²⁵ Diani M, "The Concept of Social Movement", *The Sociological Review* 40,no.1,(1992):1
25,<https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-954X.1992.tb02943.x#articleCitationDownloadContainer> (diakses pada 12 Februari 2020).

²⁶ Ani Widyani Soetjipto et al., *Transnasionalisme: Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

²⁷ Lianna Amirkhanyan, "GLOBALITATION AND INTERNATIONAL RELATIONS",
<http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-12-cdac/Globalization-and-International-Relations-Lianna-Amirkhanyan.pdf> (diakses pada 27 Januari 2021).

color) dengan orang-orang kulit putih didapatkan melalui gerakan sosial yang mereka lakukan. Hal tersebut menunjukkan kekuatan dari gerakan sosial dalam memberikan perubahan terhadap sistem yang sudah lama berlaku. Melalui gerakan sosial, masyarakat mampu membuat pendapat mereka didengar karena aktivitas tersebut menciptakan dasar untuk perubahan.²⁸

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini menurut Denzin dan Lincoln (1994) “*Qualitative research is multimethod in its focus, involving an interpretative, naturalistic approach in its subject matter. This means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or internet, phenomena in terms of the meaning people brings to them.*” Dengan penjelasan tersebut penelitian kualitatif berarti digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks makna yang diartikan oleh setiap orang melalui interpretasi yang didapatkan dari data-data yang terkumpul. Kualitatif digunakan untuk memahami perilaku, cara berpikir, sikap, serta interaksi antar manusia, dan menghasilkan data *non-numeric*. Dengan menggunakan metode kualitatif, diharapkan dapat menjelaskan fenomena sosial yang terjadi secara komprehensif.²⁹

²⁸ <https://hbr.org/2017/01/how-protests-become-successful-social-movements>

²⁹ Vibha Pattak et al., “Qualitative research”, US National Library of Medicine, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3757586/> (diakses pada 20 Februari 2020).

Jenis metode kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Moh. Nazir, metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan mencari fakta serta interpretasi tepat yang bertujuan untuk menjelaskan suatu situasi atau peristiwa.³⁰

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini akan didapatkan melalui studi pustaka/dokumen. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari sumber- sumber deskriptif seperti buku, jurnal, laporan resmi, dan berita yang valid. Selain itu, mengingat penelitian ini sangat bertumpu pada asas sebuah negara, maka penulis juga akan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen pemerintah, terutama perjanjian tertulis “*Sino-British Joint Declaration*” dan juga Dasar Hukum (*Basic Law*) Hong Kong.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dimulai dengan **Bab I “Pendahuluan”**. Pada bagian ini penulis telah memaparkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang di dalamnya terdapat pembatasan masalah dan perumusan masalah. Setelah itu, penulis juga memaparkan tujuan dan kegunaan penelitian serta kerangka pemikiran berdasarkan teori dan konsep hubungan internasional. Pada akhir bab ini, terdapat metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika

³⁰ Moh. Nazir, *Metode penelitian* / Mohammad Nazir, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

penulisan.

Bab II berisi tentang pemaparan perjanjian “*Sino-British Declaration*” dan pengaplikasiannya terhadap dasar hukum Hong Kong. Kemudian, penulis memaparkan sekaligus mengkaji asas “*one country, two systems*” dengan kaitannya terhadap kondisi domestik Hong Kong saat ini.

Pada **Bab III** penulis mengkaji reaksi masyarakat Hong Kong terhadap penerapan asas “*One country, two systems*” sebelum demonstrasi Tahun 2014, yaitu pada tahun 2010, 2012, dan tahun 2013.

Bab IV pada bagian ini penulis mengkaji perubahan reaksi masyarakat Hong Kong terhadap penerapan asas “*One country, two systems*” setelah tahun 2014 terutama terkait demonstrasi yang dilakukan masyarakat Hong Kong terkait hak- hak demokrasi. Di dalam bab ini penulis telah melakukan analisis dengan mengkaji data-data dari Bab II berdasarkan konsep demokrasi iliberal dari Fareed Zakharia dan konsep grakan sosial dari Charles Tilly.

Bab V “Kesimpulan” pada bagian ini penulis memaparkan hasil dari keseluruhan penelitian.